

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pionir lembaga keuangan syariah adalah *Mit Ghamir Local Saving Bank* berdiri di Mesir tahun 1963 yang juga merupakan bukti perbankan syariah di kancah dunia mulai berkembang di negara-negara Timur Tengah. Seiring berjalannya waktu, perbankan syariah juga berkembang di negara lainnya, termasuk di kawasan Asia Tenggara (Wasiaturrahma, 2022). Sistem perbankan tanpa adanya praktik seperti *riba* (bunga), *maysir* (spekulasi), *gharar* (ketidakpastian), dan lainnya merupakan wujud memenuhi permintaan masyarakat akan jasa keuangan syariah sebagai akibat munculnya perbankan syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Di Indonesia, awal mula perkembangan perbankan syariah tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bentuk tanggapan atas kebutuhan umat Islam khususnya Indonesia mengenai perbankan dengan sistem berdasarkan syariah. Perkembangan sektor perbankan syariah mulai terlihat pesat saat Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diterbitkan. Kesadaran umat Islam mengenai pentingnya aktivitas ekonomi dengan prinsip syariah dan kebutuhan umat Islam akan layanan keuangan syariah merupakan salah satu pendorong perkembangan perbankan syariah. Selain itu, larangan *riba* dalam Islam membuat perbankan konvensional dianggap tidak sesuai (Haryanti et al., 2024).

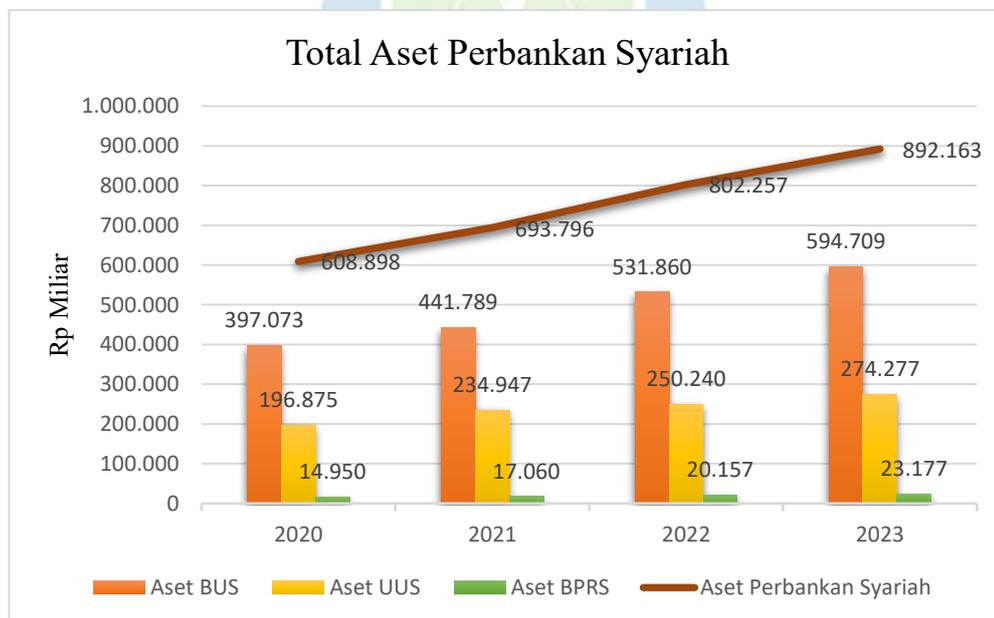
Firman Allah SWT dalam Q.S Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَانفُوا إِلَهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”*

Jumlah perbankan syariah serta total aset yang dikelola naik terlihat seiring meningkatnya perbankan syariah di Indonesia. Total perbankan syariah terlihat pada laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia mencapai 206 unit di tahun 2023 terdiri dari 173 unit Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 13 unit Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Otoritas Jasa keuangan, 2024).

Gambar 1.1
Pertumbuhan Total Aset Perbankan Syariah



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020-2023, data diolah oleh penulis tahun 2024

Salah satu indikator dari perkembangan perbankan syariah yaitu total aset (Syafrida dan Aminah, 2015). Total aset menggambarkan seluruh aset produktif yang dimiliki bank dan memberikan gambaran tentang kemampuan bank untuk mendukung pertumbuhan dan menjaga stabilitas di tengah fluktuasi ekonomi, lebih dari hanya melihat profitabilitas yang bisa lebih fluktuatif dalam jangka pendek. Berdasarkan gambar 1.1 terlihat pertumbuhan pada periode 2020-2023 dari total aset perbankan syariah. Publikasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan data dari hasil laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia menyatakan penambahan aset Bank Umum Syariah (BUS) dicatat sebesar Rp397,07 triliun di tahun 2020 dengan total aset sebesar Rp608,90 triliun atau tumbuh 13,11% (yoy) yang mengalami percepatan dari tahun sebelumnya dan tumbuh positif. Terjaganya kestabilan Bank Umum Syariah (BUS) dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional (BUK) terjadi selama tahun 2020 ini (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Pada tahun 2021, aset perbankan syariah sebesar Rp693,80 triliun atau 13,94% (yoy) dengan Bank Umum Syariah (BUS) mencatatkan penambahan aset sebesar Rp441,79 triliun. Adanya kenaikan dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa kondisi ketahanan perbankan syariah semakin solid (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Selain itu, perkembangan total aset pada tahun 2022 dengan capaian sebesar Rp802,26 triliun, atau tumbuh 15,63% (yoy) membuktikan kemampuan perbankan syariah dalam beradaptasi serta mampu tumbuh positif, dengan Bank Umum Syariah (BUS) mencatatkan penambahan aset sebesar Rp531,860 triliun (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Kondisi industri perbankan syariah di tengah ketidakpastian

perekonomian yang melanda pada tahun 2023 tetap mencatatkan pertumbuhan yang stabil dimana total aset dengan capaian sebesar Rp892,17 triliun atau tumbuh 11,21% (yoy) dengan Bank Umum Syariah (BUS) mencatatkan penambahan aset sebesar Rp594,71 triliun. Pertumbuhan total aset perbankan syariah tahunan yang mempertahankan capaian pertumbuhan dua digit membuktikan kokohnya rata-rata pertumbuhan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (Otoritas Jasa keuangan, 2024).

Dalam ekonomi syariah, Bank Umum Syariah (BUS) memegang peranan penting diantaranya yaitu:

1. Menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat dengan cara memastikan seluruh transaksi telah terbebas dari hal-hal yang diharamkan seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan sebagainya. Dimana Bank Umum Syariah (BUS) tidak hanya berorientasi untuk memperoleh keuntungan saja. Kemudian, Bank Umum Syariah (BUS) juga lebih mengutamakan pembiayaan yang mendukung sektor produktif seperti UMKM, pendidikan, dan infrastruktur yang berdampak positif bagi masyarakat (Aisyah & Ansori, 2025).
2. Menciptakan keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan yang nantinya akan mampu bersinergi dan menjadi mitra pemerintah dalam upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dengan peran dan kapasitas yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah (BUS) yang diberikan amanah dari masyarakat untuk mengelola dana pihak ketiga (tabungan, giro, dan deposito), yang akan dikelola dan disalurkan kembali dalam bentuk

pembiayaan. Keuntungan yang diperoleh sebagian akan digunakan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang disalurkan melalui pembiayaan *Qardul Hasan*. Hal tersebut bertujuan untuk membantu menurunkan angka kemiskinan dan menumbuhkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan terjadi pemerataan ekonomi (Subaidi, 2018).

3. Menciptakan produk dan layanan keuangan yang inklusif seperti pembiayaan mikro, tabungan berbasis syariah, dan asuransi syariah. Produk-produk tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat dari berbagai tingkat pendapatan dan kondisi ekonomi sehingga memperluas akses keuangan yang lebih terjangkau untuk semua kalangan. Selain itu, Bank Umum Syariah (BUS) berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan penghasilan rendah atau kelompok rentan secara ekonomi melalui pembiayaan berbasis syariah. Hal tersebut bertujuan untuk mendorong kemandirian dan pembangunan ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menciptakan ketahanan finansial dengan mengedepankan prinsip keadilan serta berbagi risiko (Lailiyah et al., 2024).
4. Mendukung kebijakan moneter Indonesia, khususnya dengan menstabilkan inflasi, meningkatkan akses terhadap pembiayaan, dan berkontribusi terhadap operasi pasar terbuka berdasarkan hukum Islam. Salah satu upaya untuk menstabilkan inflasi melalui penggunaan Sertifikat Bank Indonesia

Syariah (SBIS) yaitu dengan menstabilkan jumlah uang beredar yang nantinya mendukung stabilitas harga. Hal tersebut sesuai dengan misi perbankan syariah yaitu memastikan bahwa transaksi keuangan tidak hanya memberikan manfaat finansial, tetapi juga mendukung stabilitas makroekonomi (Rohimah et al., 2024).

Kondisi makroekonomi senantiasa tidak lepas dalam memengaruhi kegiatan operasional perbankan syariah. Menurut Mankiw (2007) dalam (Kristianingsih et al., 2022), kondisi makroekonomi dapat dilihat dengan variabel penting diantaranya Produk Domestik Bruto (PDB), suku bunga, dan inflasi. Periode 2020-2023 menandai dampak besar dari pandemi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), suku bunga, dan inflasi yang menciptakan tekanan besar termasuk pada Bank Umum Syariah (BUS). Menurut Sukirno (2010) dalam (Kurniawan et al., 2019) Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan hasil produksi di suatu wilayah tertentu berupa keseluruhan produk dan layanan berdasarkan periode waktu tertentu.

Gambar 1.2

Produk Domestik Bruto (PDB) Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran 2020-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2020-2023, data diolah oleh penulis tahun 2024

Gambar 1.2 menggambarkan perekonomian Indonesia tahun 2020-2023 yang diukur berdasar pada Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan menurut pengeluaran secara keseluruhan terjadi tren kenaikan, walaupun terlihat adanya ketidakstabilan sebagai akibat dari pandemi di tahun 2020. Selanjutnya, pemulihan pasca pandemi sudah terlihat pada perekonomian sejak tahun 2021 lebih tepatnya pada triwulan 2 seiring dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mengalami peningkatan (Badan Pusat Statistik, 2023). Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu tolak ukur pertumbuhan ekonomi di suatu negara, dimana ketika Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh positif artinya perekonomian sedang bertumbuh yang cenderung mendorong aktivitas konsumsi dan bisnis.

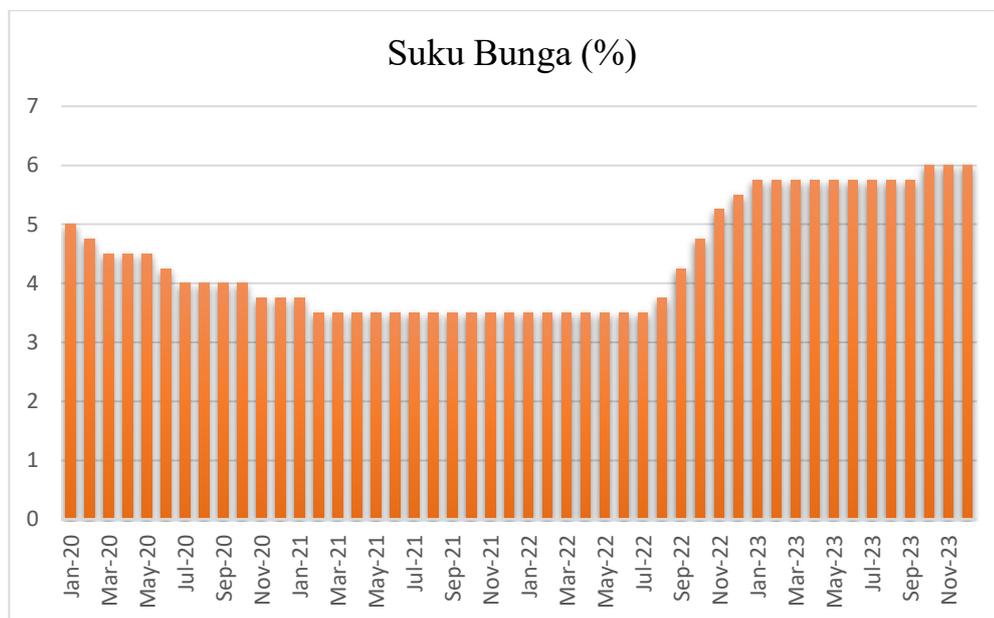
Hubungan Produk Domestik Bruto (PDB) dengan dunia perbankan adalah Produk Domestik Bruto (PDB) yang berkaitan dengan tabungan (Ilmia et al., 2024).

Berdasarkan penelitian Indura et al (2019) membuktikan hubungan Produk Domestik Bruto (PDB) yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia. Hubungan Produk Domestik Bruto (PDB) yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) maka pertumbuhan aset perbankan syariah juga dapat mengalami peningkatan. Sedangkan hasil yang signifikan dari variabel Produk Domestik Bruto (PDB) mengindikasikan adanya kondisi Produk Domestik Bruto (PDB) yang memengaruhi keseluruhan nilai aset yang dihimpun perbankan syariah. Hal tersebut terjadi karena secara langsung kondisi stabil Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi pendorong bagi perbankan syariah untuk melakukan investasi pada sektor-sektor produktif. Sedangkan penelitian Aryanti & Wahyudi (2022) membuktikan hubungan Produk Domestik Bruto (PDB) tidak signifikan terhadap pertumbuhan total aset perbankan syariah. Kondisi tersebut akan mengakibatkan masyarakat dengan penghasilan tinggi memilih mengeluarkan pendapatan mereka untuk kebutuhannya bukan disimpan dalam bentuk tabungan di perbankan syariah penyebabnya yaitu ketika kenaikan pendapatan masyarakat mengikuti kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut Natsir (2014) dalam (Sasono, 2020), suku bunga merupakan gambaran tantangan guna mencapai target inflasi serta kondisi ekonomi terkini yang ditunjukkan dengan angka. Pengesahan oleh Bank Indonesia (BI) dalam rangka mengumumkan suku bunga yang dijadikan patokan lembaga keuangan di seluruh

Indonesia guna menetapkan suku bunga baik tabungan maupun pinjaman dilaksanakan secara rutin setiap bulannya dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) (Bank Indonesia, 2024).

Gambar 1.3
Suku Bunga (%)



Sumber: Bank Indonesia (BI) periode 2020-2023, data diolah oleh penulis tahun 2024

Gambar 1.3 menunjukkan bahwa suku bunga mengalami pertumbuhan yang tidak stabil. Suku bunga pada tahun 2020 terus mengalami penurunan terlihat pada bulan Desember yang berada di level terendah yaitu 3,75%. Hal tersebut merupakan upaya dalam mempertahankan kestabilan perekonomian serta mendorong pemulihan ekonomi di masa pandemi (Laucereno, 2020). Pada tahun 2021, penurunan suku bunga terjadi pada bulan Februari hingga 3,5% sampai akhir tahun 2021. Pada tahun 2022, kenaikan suku bunga mulai terlihat dengan angka 3,75% di

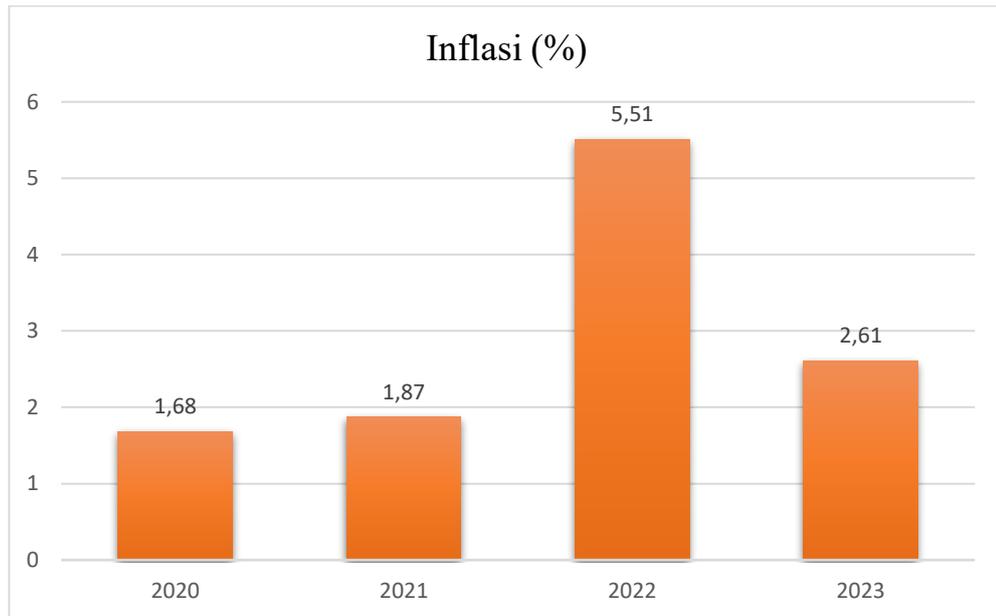
Agustus, 4,25% di September, 4,75% di Oktober, 5,25% di November, dan 5,5% di Desember. Kenaikan suku bunga tersebut merupakan langkah dari Bank Indonesia (BI) untuk meredam inflasi di Indonesia (Putri, C. A., 2022). Pada tahun 2023, suku bunga kembali naik dari tahun sebelumnya terlihat pada bulan Desember menjadi 6%. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung stabilitas perekonomian di Indonesia (Rachman, 2023). Meskipun bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, kebijakan suku bunga tetap memiliki pengaruh tidak langsung terhadap operasional bank syariah, terutama dalam hal kompetisi.

Berdasarkan penelitian Wicaksono (2022) membuktikan hubungan suku bunga yang signifikan dan negatif terhadap perkembangan aset perbankan syariah. Didukung adanya fakta dimana ketika terjadi penurunan suku bunga maka kecenderungan masyarakat untuk konsumsi meningkat dan melakukan pinjaman di perbankan syariah. Sedangkan penelitian Indura et al (2019) membuktikan hubungan variabel suku bunga yang tidak signifikan tetapi positif terhadap pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia. Di perbankan syariah, kenaikan aset dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga walaupun tidak terdapat signifikansi di dalamnya dimana perbankan syariah dalam menentukan bagi hasil mempertimbangkan nilai suku bunga yang naik atau turun supaya dalam menarik minat masyarakat dapat bersaing dengan perbankan konvensional menunjukkan tidak terdapat signifikansi.

Menurut Bank Indonesia (2020), inflasi didefinisikan sebagai peningkatan konstan dalam nilai produk dan layanan berdasarkan periode waktu tertentu. Kenaikan harga yang meluas berdampak pada harga barang lainnya menyebabkan

munculnya inflasi, dan inflasi tidak akan terjadi ketika terdapat kenaikan pada satu atau dua barang saja.

Gambar 1.4
Inflasi (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah oleh penulis tahun 2024

Gambar 1.4 menunjukkan bahwa kondisi fluktuasi yaitu perubahan yang bersifat naik turun terlihat pada pertumbuhan inflasi. Pada tahun 2020, nilai inflasi yaitu 1,68% (yoy) yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya dengan tingkat inflasi berada pada kondisi stabil yaitu 1,87% (yoy). Kerja sama yang kuat antara Bank Indonesia (BI), pemerintahan pusat dan daerah menghasilkan nilai inflasi tersebut sebagai bentuk hasil pengendalian dalam stabilitas harga (Limanseto, 2022). Pada tahun 2023, inflasi Indonesia tetap stabil dan teratur di 2,61% (yoy), turun dari 5,51% (yoy) pada tahun 2022. Pencapaian dalam pengendalian fluktuasi harga di tengah ketidakpastian tersebut merupakan

hasil dari kerja sama yang terjalin dengan baik dan kuat antara berbagai pihak sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartanto (Limanseto, 2024). Ketika inflasi meningkat akan mengakibatkan kenaikan harga yang menjadikan harga relatif lebih mahal. Hal tersebut akan berdampak pada menurunnya tingkat konsumsi dan berdampak juga pada tingkat konsumsi. Selain itu, berdampak pula pada Bank Umum Syariah (BUS) yang akan menyebabkan tingginya rasio dan margin tetapi gagal membayar utang yang nantinya mengakibatkan kegagalan pembiayaan (Ilmia et al., 2024).

Berdasarkan penelitian Millania et al (2021) memperoleh hasil hubungan inflasi yang signifikan dan negatif terhadap aset perbankan syariah. Inflasi memiliki pengaruh negatif menunjukkan ketika inflasi tinggi, akan terjadi penurunan aset perbankan syariah. Adapun signifikansi membuktikan ketidakstabilan inflasi akan menyebabkan perubahan pada perbankan syariah. Bagi sebuah perbankan, inflasi memiliki pengaruh pada biaya operasional yang bertambah akan berdampak negatif bagi perbankan. Saat inflasi berada pada kondisi yang tinggi akan mengakibatkan penurunan tingkat konsumsi di masyarakat. Adapun penelitian Oktaviani & Nanda (2019) menunjukkan hasil berbeda yaitu hubungan inflasi yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan perbankan syariah. Perbankan syariah mengalirkan pembiayaan kepada masyarakat untuk memaksimalkan keuntungan sehingga menyebabkan terjadinya hal tersebut. Kapasitas pembelian masyarakat bisa dipertahankan dengan meningkatkan nisbah bagi hasil, walaupun peningkatan inflasi seharusnya dapat menyebabkan turunnya kapasitas pembelian masyarakat

tetapi tidak akan terjadi karena adanya langkah strategis perbankan syariah tersebut serta selanjutnya penurunan inflasi pun terjadi secara perlahan.

B. Identifikasi Masalah

Berikut identifikasi masalah dapat diidentifikasi dengan merujuk latar belakang sebelumnya, diantaranya:

1. Masih terjadi penurunan pada aset perbankan syariah khususnya aset Bank Umum Syariah (BUS), meskipun aset perbankan syariah mencapai pertumbuhan dua digit berdasarkan rata-rata pertumbuhan tahunan.
2. Masih terjadi kondisi fluktuasi, Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami perubahan yang tidak stabil.
3. Masih terjadi pertumbuhan suku bunga yang tidak stabil.
4. Masih menunjukkan kondisi fluktuasi, inflasi terus mengalami perubahan yang tidak menentu.

C. Batasan Masalah

Penulis memutuskan meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengacu pada uraian sebelumnya mengenai pertumbuhan aset Bank Umum Syariah (BUS) dengan batasan masalah yaitu Produk Domestik Bruto (PDB), suku bunga, dan inflasi. Selain itu, berbagai penelitian terdahulu memperoleh hasil yang beragam membuat ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut menggunakan judul **“Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Suku Bunga, dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Aset Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia Periode 2020-2023”**.

D. Rumusan Masalah

Berikut merujuk pada latar belakang di atas, rumusan masalah diantaranya:

1. Apakah Produk Domestik Bruto (PDB) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia?
2. Apakah suku bunga secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia?
3. Apakah inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia?
4. Apakah Produk Domestik Bruto (PDB), suku bunga, dan inflasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Berikut merujuk pada latar belakang di atas. tujuan penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Produk Domestik Bruto (PDB) secara parsial terhadap pertumbuhan aset Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis suku bunga secara parsial terhadap pertumbuhan aset Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis inflasi secara parsial terhadap pertumbuhan aset Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis Produk Domestik Bruto (PDB), suku bunga, dan inflasi secara simultan terhadap pertumbuhan aset Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Berikut merujuk pada latar belakang di atas, manfaat penelitian diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Di masa mendatang dalam pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian dapat berkontribusi dan dijadikan referensi melalui informasi tentang pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), suku bunga, dan inflasi terhadap pertumbuhan aset Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2020-2023.

2. Manfaat Praktis

Pemahaman terkait pengaruh faktor makroekonomi akan membantu Bank Umum Syariah (BUS) untuk merancang strategi pengelolaan dan ketahanan aset. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini untuk bahan rujukan tentang pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), suku bunga, dan inflasi terhadap pertumbuhan aset Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode 2020-2023.